

ACTOR NETWORK KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR DI KABUPATEN BANYUMAS

Farah Nur Azizah

NPP. 32.0436

Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: farahnur9321@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Vinda Verina KDP, S.STP., M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The traditional market revitalization policy in Banyumas Regency, especially in Sumpiuh Market, faces various challenges in its implementation. Although the revitalization process has been carried out, some traders are still reluctant to occupy official kiosks because the location is considered less strategic and has an impact on decreasing income. This results in irregular market spatial planning and the emergence of abandoned buildings that have not been optimally utilized. **Purpose:** This study aims to identify the actors involved in the market revitalization policy and analyze the interaction network between policy components using the Social Network Analysis (SNA) approach based on the theory of Ryan Light and James Moody (2020). **Method:** The approach used in this study is descriptive qualitative with the help of MAXQDA and Gephi software. **Result:** The results of the study show that there are 28 actors and 186 relationships that reflect high communication intensity, with the Industry and Trade Service as the most central actor. Based on the six dimensions of social network analysis, it was found that: (1) the structural dimension shows high network density and close actor connectivity; (2) the dynamic dimension shows the development of interaction patterns, although information diffusion is not yet even; (3) the social dimension shows a tendency towards homogeneous relationships and brokerage roles among actor groups; (4) the multilevel dimension shows the dominance of horizontal interactions; (5) the multimodal dimension shows that the involvement of non-human actors such as regulation and infrastructure is still complementary; and (6) the computing technology dimension reveals that the use of information technology is still limited to administrative records and does not support optimal data-based decision-making. **Conclusion:** It can be concluded that the actor network in the market revitalization policy in Banyumas Regency is quite effective in supporting policy planning and implementation. However, increasing the capacity of analytical technology is necessary to strengthen the data-based decision-making process.

Keywords: Actor Network, Market Revitalization Policy, Social Network Analysis

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Banyumas, khususnya di Pasar Sumpiuh, menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun proses revitalisasi telah dilaksanakan, sebagian pedagang masih enggan menempati kios resmi karena lokasinya dianggap kurang strategis dan berdampak pada penurunan pendapatan. Hal ini mengakibatkan ketidakteraturan tata ruang pasar dan munculnya bangunan mangkrak yang belum difungsikan secara optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan revitalisasi pasar serta menganalisis jaringan interaksi antarkomponen kebijakan dengan menggunakan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) berdasarkan teori Ryan Light dan James Moody

(2020). **Metode:** Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan bantuan perangkat lunak MAXQDA dan Gephi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 28 aktor dan 186 relasi yang mencerminkan intensitas komunikasi yang tinggi, dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai aktor yang paling sentral. Berdasarkan enam dimensi analisis jaringan sosial, ditemukan bahwa: (1) dimensi struktural memperlihatkan kepadatan jaringan yang tinggi dan keterhubungan aktor yang erat; (2) dimensi dinamis menunjukkan adanya perkembangan pola interaksi, meskipun difusi informasi belum merata; (3) dimensi sosial menampilkan kecenderungan hubungan homogen dan peran penghubung (*brokerage*) di antara kelompok aktor; (4) dimensi multilevel memperlihatkan dominasi interaksi horizontal; (5) dimensi multimodal menunjukkan keterlibatan aktor non-manusia seperti regulasi dan infrastruktur masih bersifat pelengkap; dan (6) dimensi teknologi komputasi mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas pada pencatatan administratif dan belum mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara optimal. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa jaringan aktor dalam kebijakan revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas tergolong cukup efektif dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Namun, peningkatan kapasitas teknologi analitik perlu dilakukan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan yang berbasis data.

Kata kunci: Jaringan Aktor, Kebijakan Revitalisasi Pasar, *Actor Network Analysis*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revitalisasi pasar tradisional merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Pemerintah pusat hingga daerah menempatkan program ini sebagai prioritas untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat di tengah pertumbuhan pesat pusat perbelanjaan modern (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Di Kabupaten Banyumas, revitalisasi pasar masuk dalam RPJMD 2018–2023 sebagai strategi utama untuk memberdayakan pelaku UMKM dan memperbaiki infrastruktur perdagangan lokal. Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal, sebagaimana terlihat dari berbagai permasalahan di Pasar Sumpiuh, seperti penolakan relokasi oleh pedagang dan munculnya bangunan pasar yang mangkrak (Apriani, 2024).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Menurut Hamdi (2014), proses kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga sangat bergantung pada interaksi antaraktor serta dinamika implementasi yang terjadi di lapangan. Sebagian pedagang enggan menempati kios baru karena dianggap tidak strategis, sehingga mereka memilih berjualan di luar area resmi. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan dan menciptakan ketidakraturan tata ruang pasar. Dalam konteks ini, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi sangat penting. Berbagai studi menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kekuatan jejaring aktor yang terlibat di dalamnya (Ansell & Gash, 2008; Nurhidayah *et al.*, 2023).

Jaringan aktor dalam kebijakan publik melibatkan berbagai entitas, baik manusia maupun non-manusia, yang saling berinteraksi dan memengaruhi proses perumusan hingga implementasi kebijakan (Capaverde *et al.*, 2023). Pendekatan ini dikenal sebagai *Actor Network Theory* (ANT), yang melihat kebijakan sebagai hasil konstruksi sosial melalui proses negosiasi, translasi, dan aliansi antaraktor (Cresswell *et al.*, 2010). Dalam konteks revitalisasi pasar, aktor-aktor seperti pemerintah daerah, dinas terkait, pengelola pasar, pedagang,

infrastruktur pasar, hingga regulasi lokal memiliki peran yang berbeda-beda namun saling memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) yang dikembangkan oleh Light dan Moody (2020) memberikan kerangka konseptual untuk menganalisis hubungan antaraktor dalam jaringan kebijakan secara lebih sistematis. Dimensi-dimensi seperti sentralitas, kepadatan jaringan, keberadaan broker, serta keterlibatan aktor non-manusia memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas jaringan aktor dalam mendukung implementasi kebijakan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti MAXQDA dan Gephi, pemetaan jaringan sosial dalam kebijakan revitalisasi pasar menjadi lebih akurat dan berbasis data.

Melalui studi kasus di Pasar Sumpiuh, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat, memetakan pola interaksi mereka, dan menilai bagaimana struktur jaringan yang terbentuk dapat mendukung atau menghambat keberhasilan kebijakan revitalisasi pasar. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian jaringan kebijakan, serta rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis kolaborasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai kebijakan revitalisasi pasar selama ini umumnya berfokus pada aspek implementasi program, pembangunan fisik, peningkatan fasilitas pasar, dan dampaknya terhadap pedagang serta pengunjung. Namun, aspek jaringan aktor sebagai salah satu determinan keberhasilan kebijakan belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks daerah seperti Kabupaten Banyumas. Padahal, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi program dan dukungan anggaran, tetapi juga oleh sejauh mana aktor-aktor yang terlibat dapat berinteraksi dan berkoordinasi secara efektif.

Di sisi lain, penelitian yang sudah ada cenderung belum menggunakan pendekatan pemetaan jaringan sosial secara sistematis untuk melihat bagaimana pola hubungan antaraktor terbentuk, siapa yang berperan sentral, serta bagaimana pengaruh dan informasi mengalir dalam proses kebijakan. Belum adanya pemetaan jaringan secara menyeluruh menyebabkan potensi disfungsi koordinasi dan komunikasi antarpihak sering kali tidak teridentifikasi sejak awal. Hal ini berdampak pada munculnya permasalahan di lapangan seperti resistensi pedagang terhadap relokasi, kios mangkrak, dan ketidakefektifan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun.

Selain itu, keterlibatan aktor non-manusia seperti regulasi, teknologi informasi, infrastruktur pasar, dan sistem administrasi digital belum banyak dilibatkan secara analitis sebagai bagian dari jaringan kebijakan. Padahal, entitas-entitas tersebut juga memiliki peran penting dalam memperkuat atau bahkan menghambat efektivitas implementasi kebijakan, terutama dalam era digital dan tata kelola berbasis data.

Kesenjangan lainnya juga terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan teknologi komputasi dalam mendukung pengambilan keputusan. Meskipun data tersedia, belum banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan hasil analisis jaringan sebagai dasar penentuan strategi kolaborasi dan penguatan peran masing-masing aktor. Hal ini menyebabkan keputusan sering kali tidak berbasis pada pemetaan aktual kondisi interaksi yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil posisi untuk mengisi celah tersebut dengan menelusuri secara komprehensif siapa saja aktor yang terlibat dalam kebijakan revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas, serta bagaimana jaringan interaksi antaraktor terbentuk dan berfungsi. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika jaringan aktor dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih kolaboratif, efektif, dan adaptif.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai jaringan aktor dalam kebijakan publik telah dilakukan oleh berbagai peneliti dalam konteks dan sektor yang berbeda. Pujiastuti *et al.* (2022) meneliti jaringan aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang dan menemukan bahwa Kantor Pertanahan berperan sebagai aktor dominan dalam koordinasi dan pelaksanaan program. Sementara itu, Primaresti *et al.* (2022) memetakan jaringan dan konflik peran dalam isu rasisme Papua melalui media sosial Twitter, yang mengungkapkan keterlibatan multiaktor dan dominasi sentimen negatif dalam ruang digital.

Rahardian & Zarkasi (2021) mengkaji jaringan advokasi dalam penolakan izin lingkungan pengolahan limbah berbahaya di Desa Lakardowo. Mereka menemukan bahwa meskipun jaringan telah terbentuk dengan baik, perubahan kebijakan belum tercapai secara signifikan. Penelitian oleh Sudirman *et al.* (2022) menelusuri jaringan kebijakan dalam program PKSAI di Kabupaten Gowa, namun mendapati kelemahan dalam aspek kelembagaan aktor yang terlibat, yang menghambat efektivitas implementasi. Nurhidayah *et al.* (2023) menganalisis jaringan aktor dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi. Mereka menemukan adanya model pentahelix, namun dihadapkan pada persoalan komunikasi dan koordinasi antara aktor utama.

Dalam konteks pengembangan sektor pariwisata, Purba *et al.* (2021) mengidentifikasi jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo, dengan hasil bahwa koordinasi antaraktor masih belum optimal meskipun Dinas Pariwisata berperan sentral. Capaverde *et al.* (2023) memperluas penerapan *Actor Network Theory* untuk studi keselamatan kerja, dengan fokus pada hubungan sosial dan teknis dalam sistem kompleks.

Cresswell *et al.* (2010) memperkenalkan *Actor-Network Theory* sebagai pendekatan untuk mengevaluasi intervensi teknologi informasi dalam layanan kesehatan, dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara desain sistem dan praktik kerja pengguna. Sementara itu, Bilodeau & Potvin (2018) menggunakan pendekatan ANT untuk mengurai kompleksitas intervensi kesehatan masyarakat, dengan menekankan pentingnya keterhubungan entitas manusia dan non-manusia dalam jaringan kebijakan.

Kesepuluh penelitian di atas menunjukkan bahwa jaringan aktor memainkan peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik. Namun demikian, belum ada penelitian yang secara spesifik menyoroti jaringan aktor dalam konteks kebijakan revitalisasi pasar rakyat, khususnya di daerah seperti Kabupaten Banyumas. Selain itu, penggunaan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) secara teknis dengan bantuan perangkat lunak pemetaan jaringan seperti MAXQDA dan Gephi juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memetakan dan menganalisis jaringan aktor dalam kebijakan revitalisasi Pasar Sumpiuh sebagai studi kasus.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian kebijakan publik, khususnya pada konteks kebijakan revitalisasi pasar tradisional, dengan memanfaatkan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) berbasis teori Ryan Light dan James Moody (2020). Pendekatan ini belum banyak digunakan dalam penelitian terdahulu yang membahas kebijakan serupa, sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika kebijakan secara struktural, sosial, dan teknologis.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek, pendekatan, dan fokus analisisnya. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak membahas revitalisasi pasar dari aspek dampak ekonomi, fisik, atau partisipasi masyarakat secara umum, namun belum secara komprehensif menganalisis bagaimana struktur dan dinamika jaringan aktor memengaruhi keberhasilan kebijakan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi aktor-aktor kunci, tetapi juga memetakan pola relasi mereka berdasarkan enam dimensi SNA:

struktural, dinamis, sosial, multilevel, multimodal, serta pemanfaatan *big data* dan teknologi komputasi.

Kebaruan lain yang ditawarkan adalah penggunaan perangkat lunak MAXQDA dan Gephi untuk menganalisis dan memvisualisasikan jaringan aktor secara kuantitatif dan kualitatif. Kombinasi metode ini memungkinkan peneliti mengungkap intensitas komunikasi, peran strategis aktor (*degree, closeness, betweenness centrality*), serta clustering antaraktor dalam kebijakan revitalisasi Pasar Sumpiuh. Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan bukti empirik berbasis data untuk menilai efektivitas struktur jaringan dan peran aktor dalam implementasi kebijakan daerah.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori jaringan sosial dalam konteks kebijakan publik, khususnya melalui integrasi pemikiran Light dan Moody (2020) mengenai pentingnya memahami hubungan antarkomponen manusia dan non-manusia dalam pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini memperluas cakupan teori *Actor-Network* yang selama ini lebih sering digunakan dalam studi teknologi dan ilmu sosial, menjadi alat analisis yang aplikatif dalam konteks pemerintahan dan kebijakan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara ilmiah dalam dua aspek utama: pertama, memperluas pemanfaatan *Social Network Analysis* dalam kebijakan revitalisasi pasar yang masih jarang dilakukan, dan kedua, menyajikan model analisis kebijakan yang berbasis pemetaan relasi aktor sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan kolaboratif yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan lokal.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan aktor dalam kebijakan revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas dengan studi kasus pada Pasar Sumpiuh. Analisis dilakukan untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat serta bagaimana pola interaksi dan relasi yang terbentuk di antara mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) berdasarkan teori Ryan Light dan James Moody (2020), penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur jaringan, intensitas komunikasi, dan posisi strategis masing-masing aktor dalam jaringan kebijakan, guna mendukung terciptanya tata kelola kolaboratif dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data di tingkat daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dinilai paling sesuai untuk menggali secara mendalam dinamika sosial yang kompleks dalam kebijakan publik, khususnya dalam mengamati interaksi dan hubungan antaraktor yang terlibat dalam kebijakan revitalisasi pasar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks lokal, sudut pandang masing-masing aktor, serta proses negosiasi dan koordinasi yang terjadi selama perumusan dan implementasi kebijakan. Sesuai panduan Nurdin dan Hartati (2018), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami realitas sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan informan dalam konteks sosial yang alami. Pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Ryan Light dan James Moody (2020), yang menekankan pentingnya analisis jaringan secara struktural, sosial, dinamis, dan berbasis teknologi untuk memahami efektivitas jejaring kebijakan publik.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Kabupaten Banyumas, dengan fokus utama pada kebijakan revitalisasi Pasar Sumpiuh. Lokasi ini dipilih karena Pasar Sumpiuh merupakan salah satu pasar yang mengalami revitalisasi dalam beberapa tahap, namun masih menyisakan berbagai permasalahan implementatif seperti kios mangkrak dan penolakan pedagang terhadap relokasi. Kasus ini menjadi representasi penting dari tantangan pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar di tingkat daerah. Sebagaimana dinyatakan oleh

Simangunsong (2019), pemilihan lokasi dan informan secara purposif merupakan strategi yang tepat dalam penelitian pemerintahan untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dengan tujuan kebijakan yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, terdiri dari unsur pemerintah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas), pengelola pasar, pedagang aktif dan pasif, serta tokoh masyarakat sekitar pasar. Informan kunci adalah pejabat struktural dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, karena memiliki posisi strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan revitalisasi, serta koordinator pasar dan perwakilan pedagang yang secara langsung mengalami dampak kebijakan.

Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan perangkat lunak MAXQDA untuk proses coding dan analisis tematik, serta Gephi untuk memvisualisasikan jaringan sosial antaraktor. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi posisi sentralitas aktor, kekuatan hubungan, kelompok komunikasi, dan distribusi informasi dalam kebijakan revitalisasi pasar. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan berdasarkan enam dimensi utama SNA, yakni struktural, dinamis, sosial, multilevel, multimodal, dan big data, guna memberikan gambaran utuh tentang kekuatan dan tantangan jaringan kebijakan di tingkat daerah. Sugiyono (2019) menegaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan interaktif, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang menafsirkan makna data berdasarkan konteksnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada teori *Social Network Analysis* yang dikembangkan oleh Ryan Light dan James Moody, yang mencakup enam dimensi utama: struktural, dinamis, sosial, multilevel, multimodal, serta big data dan teknologi komputasi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis jaringan aktor dalam kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Banyumas, dengan studi kasus pada Pasar Sumpiuh. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengelola pasar, pedagang, dan tokoh masyarakat, serta melalui observasi dan studi dokumen kebijakan terkait.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 28 aktor dengan 186 relasi yang terbentuk dalam jejaring kebijakan revitalisasi pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai aktor paling sentral dalam jaringan tersebut, sementara hubungan antarkelompok aktor menunjukkan adanya komunikasi intensif namun belum sepenuhnya merata. Pola jaringan memperlihatkan struktur yang cukup padat, tetapi belum seluruh aktor memainkan peran aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara kolektif. Selain itu, keterlibatan aktor non-manusia seperti regulasi, teknologi informasi, dan sistem pendataan masih bersifat pelengkap dan belum diintegrasikan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.

Pembahasan dalam bagian ini akan menguraikan secara sistematis tiap dimensi analisis, guna menjelaskan bagaimana kekuatan jaringan, posisi aktor, dan hambatan relasional dapat memengaruhi efektivitas kebijakan revitalisasi pasar di tingkat daerah.

3.1. Aktor yang Terlibat dalam Kebijakan Revitalisasi di Pasar Kabupaten Banyumas

Dalam kerangka *Social Network Analysis* (SNA), aktor merupakan elemen utama dalam jaringan kebijakan. Mereka mencakup individu, organisasi, maupun institusi yang saling berinteraksi melalui koordinasi, komunikasi, atau kolaborasi kebijakan. Dalam konteks revitalisasi Pasar Sumpiuh di Kabupaten Banyumas, identifikasi aktor menjadi tahap awal yang penting untuk memahami struktur jaringan kebijakan. Proyek revitalisasi ini didanai melalui

APBD dan melibatkan sejumlah pihak, seperti Pemkab Banyumas, Bappedalitbang, Disperindag, DPU, kontraktor, dan pengelola pasar

Melalui analisis data wawancara menggunakan MAXQDA, ditemukan 28 aktor yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Aktor-aktor tersebut mencakup pemerintah daerah, OPD teknis, konsultan, kontraktor, pengelola pasar, paguyuban pedagang, masyarakat, hingga pembeli sebagai pengguna akhir. Peran mereka beragam, mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana teknis, pengelola anggaran, hingga penerima manfaat langsung dari revitalisasi.

Gambar 1. Daftar Aktor Berdasarkan Presentase Kemunculannya

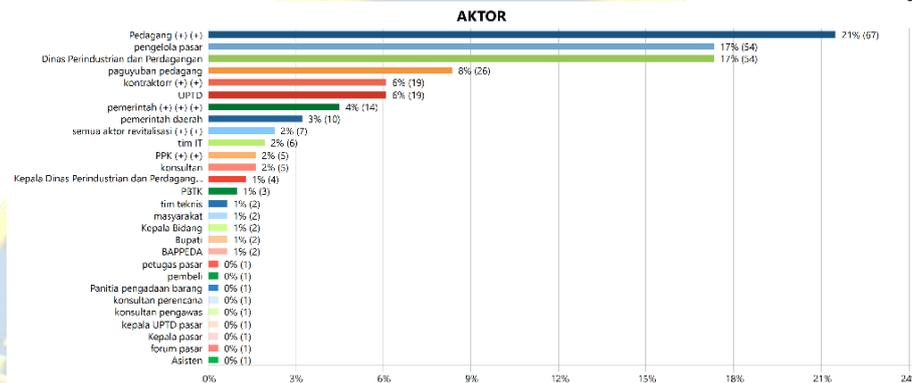


Diagram partisipasi menunjukkan bahwa intensitas keterlibatan aktor berbeda-beda, dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai aktor paling sentral. Keberagaman aktor dan peran ini menjadi indikasi bahwa kebijakan revitalisasi pasar merupakan kebijakan multiaktor yang menuntut koordinasi lintas sektor agar berjalan efektif dan partisipatif.

3.2. Actor Network Kebijakan Revitalisasi Pasar di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis menggunakan MAXQDA dan Gephi, observasi di lapangan dan dokumentasi, data-data yang diperoleh akan dikaitkan dengan Teori SNA Ryan Light dan James Moody (2024). Dalam kerangka *Social Network Analysis* (SNA) ini, terdapat enam dimensi penting yang digunakan untuk menggali struktur dan dinamika jaringan aktor yang terlibat dalam kebijakan revitalisasi pasar ini, yaitu: struktural, dinamis, sosial, multilevel, multimodal, serta big data dan teknologi komputasi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada identifikasi aktor yang terlibat, tetapi juga memetakan hubungan (relasi), posisi, serta kekuatan interaksi antar aktor dalam jaringan kebijakan yang kompleks ini.

a. Struktural

Dalam analisis jaringan sosial, dimensi struktural memegang peranan penting dalam memahami pola hubungan antaraktor yang terlibat dalam kebijakan revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas. Dimensi ini menyoroti seberapa kuat dan efisien jaringan yang terbentuk dalam mendukung aliran informasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Untuk mengukur kekuatan dan efektivitas jaringan, digunakan lima indikator utama, yaitu *degree centrality*, *betweenness centrality*, *closeness centrality*, *density*, dan *clustering coefficient*.

Indikator pertama adalah *degree centrality*, yang mengukur jumlah koneksi langsung yang dimiliki oleh seorang aktor dalam jaringan. Semakin tinggi nilai *degree*, semakin besar kemungkinan aktor tersebut berperan sebagai simpul utama dalam komunikasi jaringan. Berdasarkan Tabel 1., Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) memiliki nilai *degree* tertinggi yaitu 39, menunjukkan bahwa institusi ini menjadi pusat komunikasi dan koordinasi kebijakan. Sebaliknya, aktor seperti Tim

Teknis hanya memiliki nilai *degree* sebesar 4, mencerminkan keterbatasan dalam koneksi langsung dengan aktor lain dan menunjukkan peran yang lebih sempit serta kemungkinan keterbatasan akses informasi.

Tabel 1. Aktor Berdasarkan Nilai Degree Centrality

No	Aktor	Degree Centrality
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39
2.	pengelola pasar	29
3.	Pedagang	24
4.	UPTD	21
5.	paguyuban pedagang	18
6.	kontraktor	16
7.	pemerintah	16
8.	pemerintah daerah	16
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16
10.	Kepala Bidang	15
11.	tim IT	13
12.	konsultan pengawas	13
13.	konsultan perencana	13
14.	Konsultan	13
15.	forum pasar	13
16.	BAPPEDA	12
17.	Bupati	10
18.	Kepala pasar	9
19.	petugas pasar	8
20.	kepala UPTD pasar	8
21.	semua aktor revitalisasi (+) (+)	7
22.	Pembeli	7
23.	Masyarakat	7
24.	Asisten	7
25.	PPK	6
26.	PBTK	6
27.	Panitia pengadaan barang	6
28.	tim teknis	4

Sumber: diolah peneliti menggunakan data laboratory hasil gephi., 2025

Indikator kedua adalah *betweenness centrality*, yang mengukur seberapa sering seorang aktor menjadi penghubung atau perantara komunikasi antar dua aktor lain yang tidak saling terhubung secara langsung. Tabel 2. menunjukkan bahwa Dinperindag memiliki nilai *betweenness* tertinggi yaitu 0.546, menandakan peran strategisnya sebagai *gatekeeper* dalam lalu lintas informasi. Di sisi lain, beberapa aktor seperti pembeli dan PPK memiliki nilai *betweenness* sebesar 0.0, yang berarti mereka hanya berperan sebagai penerima informasi tanpa kapasitas untuk menjembatani komunikasi antaraktor lainnya.

Tabel 2. Aktor Berdasarkan Nilai Betweenness Centrality

No	Aktor	Betweenness Centrality
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.108
3.	Bupati	0.094
4.	pengelola pasar	0.081
5.	Kepala Bidang	0.076
6.	BAPPEDA	0.059
7.	paguyuban pedagang	0.058
8.	UPTD	0.039
9.	Pedagang (+) (+)	0.039

No	Aktor	Betwenness Centralty
10.	petugas pasar	0.036
11.	forum pasar	0.036
12.	kepala UPTD pasar	0.029
13.	pemerintah daerah	0.025
14.	kontraktorr (+) (+)	0.015
15.	tim IT	0.012
16.	tim teknis	0.008
17.	masyarakat	0.007
18.	pemerintah (+) (+) (+)	0.006
19.	konsultan pengawas	0.002
20.	konsultan perencana	0.002
21.	Kepala pasar	0.002
22.	konsultan	0.002
23.	semua aktor revitalisasi (+) (+)	0.0
24.	Asisten	0.0
25.	PPK (+) (+)	0.0
26.	PBTK	0.0
27.	Panitia pengadaan barang	0.0
28.	Pembeli	0.0

Sumber: diolah peneliti menggunakan data laboratory hasil gephi., 2025

Selanjutnya, *closeness centrality* mengukur seberapa cepat seorang aktor dapat menjangkau semua aktor lain dalam jaringan. Menariknya, berdasarkan Tabel 3., aktor yang memiliki nilai closeness tertinggi bukan Dinperindag, melainkan pedagang, dengan nilai 0.838. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang berada dalam posisi yang sangat strategis untuk mengakses berbagai pihak dalam jaringan secara cepat, memungkinkan mereka menjadi simpul penting dalam menyampaikan umpan balik kebijakan. Sebaliknya, kepala pasar memiliki nilai closeness terendah yaitu 0.181, mengindikasikan bahwa ia sulit menjangkau aktor lain secara efisien dan perlu diperkuat dari sisi konektivitas dan integrasi dalam jaringan.

Tabel 3. Aktor Berdasarkan Nilai Closeness Centrality

No	Aktor	Closeness Centrality
1.	Pedagang	0.838
2.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0.812
3.	Pengelola Pasar	0.812
4.	Uptd	0.787
5.	Kontraktorr	0.684
6.	Pemerintah	0.666
7.	Paguyuban Pedagang	0.619
8.	Pemerintah Daerah	0.590
9.	Tim IT	0.565
10.	Semua Aktor Revitalisasi	0.562
11.	Konsultan Pengawas	0.490
12.	Konsultan Perencana	0.490
13.	Konsultan	0.490
14.	PPK	0.490
15.	Tim Teknis	0.481
16.	Pbtk	0.472
17.	Bupati	0.466
18.	Bappeda	0.464

No	Aktor	Closeness Centrality
19.	Petugas Pasar	0.464
20.	Panitia Pengadaan Barang	0.456
21.	Pembeli	0.456
22.	Kepala UPTD Pasar	0.448
23.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0.351
24.	Masyarakat	0.325
25.	Asisten	0.320
26.	Kepala Bidang	0.273
27.	Forum Pasar	0.218
28.	Kepala Pasar	0.181

Sumber: *diolah peneliti menggunakan data laboratory hasil gephi., 2025*

Indikator keempat adalah *density*, yang mengukur kepadatan jaringan berdasarkan perbandingan antara hubungan aktual dan hubungan potensial yang dapat terbentuk. Rumusnya adalah

$$Density: \frac{\text{Jumlah Hubungan Aktual}}{\text{Jumlah Hubungan Potensial}}$$

Dalam penelitian ini, diketahui terdapat 28 aktor dengan 186 relasi, sehingga density-nya adalah $\frac{186}{378} = 0,492$. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 49,2% dari total kemungkinan hubungan dalam jaringan telah terbentuk, yang menandakan struktur jaringan cukup padat dan aktif. Namun, masih terdapat ruang perbaikan untuk memperkuat relasi antaraktor yang belum terjalin secara optimal.

Indikator terakhir dalam dimensi struktural adalah *clustering coefficient*, yang mengukur sejauh mana seorang aktor dan tetangganya cenderung membentuk kelompok yang saling terhubung atau kluster. Berdasarkan Tabel 4., aktor dengan nilai *clustering coefficient* tertinggi adalah PBTk (0.649), menandakan bahwa ia berada dalam lingkungan jaringan yang sangat kohesif. Artinya, mitra kerja PBTk saling terhubung satu sama lain dan membentuk kluster yang mendukung efisiensi koordinasi. Sebaliknya, pemerintah memiliki nilai *clustering coefficient* paling rendah, yaitu 0.192, yang menunjukkan bahwa meskipun pemerintah menjalin hubungan dengan banyak aktor, hubungan antar aktor tersebut tidak saling menguatkan atau membentuk komunitas yang padat.

Tabel 4. Aktor Berdasarkan Nilai Clustering Coefficient

No	Aktor	Clustering Coefficient
1.	PBTk	0.649
2.	Asisten	0.566
3.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	0.550
4.	Tim Teknis	0.5
5.	Kepala UPTD Pasar	0.5
6.	Bupati	0.464
7.	Konsultan	0.455
8.	Forum Pasar	0.455
9.	Masyarakat	0.452
10.	Petugas Pasar	0.428
11.	Bappeda	0.427

No	Aktor	Clustering Coefficient
12.	Panitia Pengadaan Barang	0.400
13.	Konsultan Pengawas	0.390
14.	Konsultan Perencana	0.390
15.	Kepala Bidang	0.368
16.	Tim IT	0.363
17.	Pembeli	0.333
18.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0.333
19.	Kepala Pasar	0.333
20.	Kontraktorr	0.313
21.	Paguyuban Pedagang	0.313
22.	Pemerintah Daerah	0.281
23.	Pengelola Pasar	0.278
24.	Semua Aktor Revitalisasi	0.261
25.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0.246
26.	Uptd	0.236
27.	Pedagang	0.214
28.	Pemerintah	0.192

Sumber: *diolah peneliti menggunakan data laboratory hasil gephi., 2025*

Secara keseluruhan, dimensi struktural dalam jaringan kebijakan revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas menunjukkan struktur yang relatif padat dan terorganisir dengan beberapa aktor kunci yang memainkan peran dominan. Dinperindag menonjol sebagai pusat komunikasi dan penghubung utama, sementara pedagang menunjukkan peran aktif sebagai simpul distribusi informasi. Temuan ini memperkuat argumen Provan & Kenis (2008) bahwa struktur jaringan yang efektif memerlukan distribusi peran yang proporsional serta adanya manajemen kolaboratif yang mampu merespons dinamika di lapangan. Meski demikian, beberapa aktor teknis seperti kepala pasar, PPK, dan tim teknis masih perlu diperkuat peran strukturalnya agar koordinasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak.

b. Dinamis

Dimensi dinamis dalam *Social Network Analysis* (SNA) menjelaskan bagaimana hubungan antaraktor dalam suatu jaringan berubah dan berkembang seiring waktu. Dalam konteks kebijakan revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas, dimensi ini mencerminkan adaptasi hubungan antaraktor berdasarkan tahapan kebijakan yang dijalankan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hubungan-hubungan ini tidak bersifat statis, melainkan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan regulasi, dinamika kepentingan, serta respon sosial dari para pemangku kepentingan.

Salah satu indikator utama dinamika jaringan adalah *temporal network*, yaitu perubahan intensitas dan struktur interaksi seiring waktu. Hasil wawancara dengan aktor teknis menunjukkan bahwa komunikasi awal hanya melibatkan aktor internal, seperti dinas dan UPTD. Namun, ketika revitalisasi mulai berlangsung, jaringan komunikasi meluas ke kementerian, kontraktor, pedagang, dan masyarakat umum. Relasi yang awalnya kaku dan formal berkembang menjadi lebih fleksibel dan terbuka, seiring meningkatnya kesadaran semua pihak terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses revitalisasi.

Selain itu, difusi informasi atau *diffusion process* menjadi indikator penting yang menunjukkan bagaimana kebijakan, informasi teknis, dan instruksi menyebar di dalam jaringan. Di Banyumas, informasi kebijakan disampaikan melalui berbagai kanal, baik formal seperti rapat koordinasi dan surat resmi, maupun informal seperti grup WhatsApp dan pengumuman lisan di pasar. Hal ini memperlihatkan kemampuan jaringan untuk menggunakan media yang beragam guna mempercepat aliran informasi dan menjangkau aktor-aktor yang mungkin tidak terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan.

Difusi yang terjadi juga berlangsung secara dua arah. Dari sisi atas ke bawah (*top-down*), informasi disampaikan oleh dinas teknis dan pengelola pasar kepada pedagang. Namun dari sisi horizontal, informasi juga menyebar melalui komunikasi antar pedagang, paguyuban, serta petugas pasar. Proses ini memungkinkan adanya sirkulasi informasi yang cepat, sekaligus menciptakan ruang dialog antaraktor. Meskipun tantangan seperti keterlambatan informasi atau miskomunikasi tetap terjadi, adanya jalur komunikasi yang berlapis ini memperkuat kapasitas adaptif jaringan.

Secara keseluruhan, dimensi dinamis menunjukkan bahwa jaringan kebijakan revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas telah mengalami perkembangan yang positif. Terjadi peningkatan keterlibatan aktor, fleksibilitas hubungan, serta penyebaran informasi yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan. Hal ini menjadi indikasi bahwa jaringan yang terbangun memiliki kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan menyesuaikan diri terhadap dinamika kebijakan maupun kebutuhan para pemangku kepentingan.

c. Sosial

Dimensi sosial dalam analisis jaringan menyoroti bagaimana nilai, norma, dan hubungan sosial memengaruhi pola komunikasi serta kolaborasi antaraktor. Dalam konteks kebijakan revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas, hubungan antaraktor tidak hanya dibentuk melalui koneksi formal atau struktural, tetapi juga oleh keterikatan sosial yang tercipta dari pengalaman bersama, kepentingan yang sejalan, serta interaksi sehari-hari. Keterikatan ini menciptakan kelompok-kelompok informal yang membentuk karakter jaringan, baik memperkuat maupun membatasi aliran informasi dan proses pengambilan keputusan.

Konsep *homophily* menjadi salah satu penjas utama dalam dimensi ini. *Homophily* adalah kecenderungan aktor untuk lebih sering berinteraksi dengan mereka yang memiliki latar belakang, kepentingan, atau posisi yang serupa. Dalam kasus Pasar Sumpiuh, pedagang cenderung berinteraksi lebih intensif dengan sesama pedagang karena mereka berbagi pengalaman yang sama dalam menghadapi tantangan revitalisasi. Di sisi lain, pihak UPTD lebih sering berkomunikasi dengan pengelola pasar yang memiliki tanggung jawab teknis serupa. Pola interaksi ini memudahkan koordinasi internal, namun juga bisa menjadi hambatan jika hubungan lintas kelompok tidak dijaga dengan baik. Temuan ini sejalan dengan Zhong *et al.* (2022) yang menekankan bahwa kualitas lingkungan komunitas berpengaruh besar terhadap frekuensi dan kedalaman interaksi sosial, baik antar generasi maupun sesama kelompok sosial. Dalam konteks pasar tradisional, lingkungan yang mendukung komunikasi informal akan memperkuat keterhubungan sosial dan memperlancar proses koordinasi kebijakan yang bersifat partisipatif.

Selain *homophily*, konsep *brokerage and closure* menjadi penting dalam memahami dinamika sosial jaringan. *Broker* adalah aktor yang menjembatani kelompok-kelompok yang tidak terhubung langsung, sedangkan *closure* mencerminkan kedekatan hubungan dalam kelompok tertentu. Pemerintah daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai broker yang menghubungkan berbagai pihak seperti pedagang, pengelola pasar, dan kontraktor. Peran ini penting untuk menyatukan

kepentingan yang berbeda serta memastikan jalur komunikasi tetap terbuka antaraktor yang secara sosial tidak berada dalam kelompok yang sama.

Sementara itu, konsep *closure* terlihat dalam komunitas pedagang yang cenderung membentuk jaringan internal yang erat. Hubungan ini ditandai oleh komunikasi yang intensif dan saling dukung antaranggota, yang memperkuat solidaritas dalam kelompok. Meskipun struktur tertutup ini memudahkan pertukaran informasi dalam komunitas mereka, namun apabila tidak dikombinasikan dengan interaksi lintas kelompok, bisa menciptakan isolasi informasi atau resistensi terhadap kebijakan eksternal. Oleh karena itu, peran penghubung seperti pengelola pasar menjadi penting untuk menjembatani komunitas pedagang dengan struktur kebijakan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, dimensi sosial dalam jaringan kebijakan revitalisasi pasar di Banyumas menunjukkan bahwa ikatan informal antaraktor berperan besar dalam efektivitas koordinasi dan aliran informasi. Kekuatan kelompok yang homogen mempermudah penyampaian aspirasi dan koordinasi teknis, sementara kehadiran aktor penghubung atau broker menjadi kunci dalam mengintegrasikan berbagai kelompok ke dalam satu sistem kebijakan yang lebih kohesif. Maka, penguatan relasi sosial lintas kelompok melalui komunikasi terbuka dan kolaboratif menjadi penting untuk keberhasilan revitalisasi yang inklusif.

d. Multilevel

Dimensi multilevel dalam analisis jaringan kebijakan menggambarkan bagaimana interaksi tidak hanya terjadi dalam satu level struktur, tetapi melibatkan berbagai tingkatan aktor, dari tingkat pusat hingga komunitas lokal. Dalam konteks revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas, interaksi multilevel ini menjadi penting karena kebijakan berskala daerah tetap membutuhkan dukungan, arahan, dan kolaborasi dari berbagai tingkatan otoritas dan pelaksana di lapangan. Keterpaduan antarlevel menjadi salah satu kunci efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Indikator pertama dalam dimensi ini adalah *hierarchical relationships*, yaitu pola hubungan vertikal antara aktor yang memiliki perbedaan tingkat otoritas atau kedudukan. Misalnya, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai penentu arah kebijakan dan alokasi anggaran, sedangkan pengelola pasar dan UPTD bertugas menjalankan kebijakan tersebut di tingkat operasional. Pedagang, sebagai aktor di tingkat paling bawah, berperan sebagai penerima dampak kebijakan sekaligus penyedia masukan dari lapangan. Struktur ini bisa mempercepat pengambilan keputusan jika jalur komunikasi berjalan lancar, namun juga berisiko menciptakan hambatan apabila birokrasi terlalu panjang atau koordinasi kurang responsif.

Salah satu tantangan yang muncul dari hubungan hierarkis ini adalah ketimpangan akses terhadap proses pengambilan keputusan. Ketika kebijakan terlalu terpusat pada otoritas tingkat atas, pelaksana di lapangan dapat mengalami kesulitan beradaptasi karena kurangnya ruang partisipasi atau keterlambatan informasi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pedagang yang menyatakan bahwa prosedur berjenjang bisa memperlambat pelaksanaan kebijakan apabila pejabat terkait lambat merespons. Dengan demikian, efektivitas hubungan vertikal sangat ditentukan oleh kelancaran komunikasi lintas tingkatan.

Indikator kedua, *cross-level interaction*, merujuk pada bagaimana hubungan antarpelaku dari berbagai level berjalan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam praktiknya, interaksi ini terlihat dari rutinitas rapat triwulanan yang dilakukan oleh pengelola pasar bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala UPTD. Rapat ini menjadi sarana pertukaran informasi, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan revitalisasi di berbagai pasar. Interaksi seperti ini menunjukkan

adanya mekanisme koordinasi formal lintas tingkat yang berfungsi menjaga sinergi kebijakan antara pusat dan pelaksana teknis di lapangan.

Selain hubungan vertikal, interaksi horizontal juga berlangsung aktif, khususnya di tingkat komunitas pedagang. Pedagang di pasar Sumpiuh secara rutin berkomunikasi satu sama lain, saling bertukar informasi mengenai kebijakan, perubahan teknis, atau kondisi pasar. Bahkan, mereka kerap mendapatkan informasi lebih cepat dari sesama pedagang dibandingkan dari pemerintah secara langsung. Pola interaksi seperti ini membuktikan bahwa dimensi multilevel tidak hanya mengandalkan struktur formal, tetapi juga diperkuat oleh jaringan informal yang mendukung penyebaran informasi dan adaptasi kebijakan secara cepat dan kontekstual di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, koordinasi dan kolaborasi yang erat antara aktor seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengelola pasar, serta paguyuban pedagang menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan revitalisasi pasar. Park *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga dalam jaringan kebijakan publik dapat meningkatkan efisiensi organisasi, terutama ketika berbagai aktor berbagi sumber daya dan menyinergikan peran dalam pengelolaan program secara kolektif.

e. **Multimodal**

Dimensi multimodal dalam jaringan kebijakan menunjukkan bahwa aktor-aktor yang terlibat tidak berasal dari satu jenis atau kategori yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai tipe entitas dengan fungsi dan peran yang berbeda. Dalam konteks revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas, keberagaman ini mencerminkan kompleksitas struktur jaringan yang dibangun secara kolaboratif. Aktor-aktor yang terlibat mencakup unsur pemerintah (seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta UPTD), pelaksana teknis (seperti kontraktor dan tim pengawasan), pengelola pasar, paguyuban pedagang, pedagang individual, hingga pembeli sebagai penerima dampak kebijakan.

Indikator pertama, *different types of nodes*, memperlihatkan bahwa setiap aktor membawa kepentingan, otoritas, dan tanggung jawab yang berbeda dalam jaringan. Pemerintah daerah dan dinas teknis berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan pengatur anggaran, sementara kontraktor bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik revitalisasi. Di sisi lain, pedagang dan paguyuban merupakan aktor lapangan yang berinteraksi langsung dengan realitas pasar sehari-hari. Keberagaman ini menuntut adanya koordinasi lintas aktor yang efektif agar tujuan revitalisasi dapat tercapai tanpa mengabaikan perspektif dan kepentingan masing-masing pihak.

Indikator kedua, *multimodal interactions*, menggambarkan variasi dalam metode komunikasi yang digunakan oleh para aktor dalam jaringan. Interaksi dalam kebijakan revitalisasi pasar tidak hanya berlangsung melalui jalur formal seperti surat resmi dan rapat koordinasi, tetapi juga melalui komunikasi informal dan digital seperti WhatsApp dan diskusi langsung di lingkungan pasar. Pemerintah cenderung menggunakan jalur resmi untuk dokumentasi dan legitimasi kebijakan, sementara pengelola pasar dan pedagang mengandalkan komunikasi cepat dan fleksibel untuk merespons dinamika sehari-hari. Kombinasi ini menunjukkan bahwa penggunaan saluran komunikasi yang beragam dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan kecepatan informasi dalam jaringan.

Secara keseluruhan, dimensi multimodal menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan revitalisasi pasar sangat bergantung pada kemampuan jaringan untuk mengelola keberagaman aktor serta memfasilitasi komunikasi lintas peran dan saluran. Jaringan yang terdiri dari node dan interaksi yang heterogen memiliki potensi lebih besar untuk menjangkau informasi secara luas dan responsif terhadap tantangan di lapangan.

Oleh karena itu, memperkuat interaksi multimodal menjadi langkah penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan adaptif di tingkat lokal.

f. Big Data dan Teknologi Komputasi

Dimensi Big Data dan Teknologi Komputasi dalam jaringan revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas menyoroti sejauh mana data dan teknologi digunakan untuk memperkuat koordinasi, pengambilan keputusan, serta efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, dua indikator utama menjadi fokus: *big data integration* dan *computational algorithms*. Dimensi ini penting karena mendukung keberlanjutan kebijakan berbasis bukti, serta meningkatkan efisiensi manajemen informasi antaraktor.

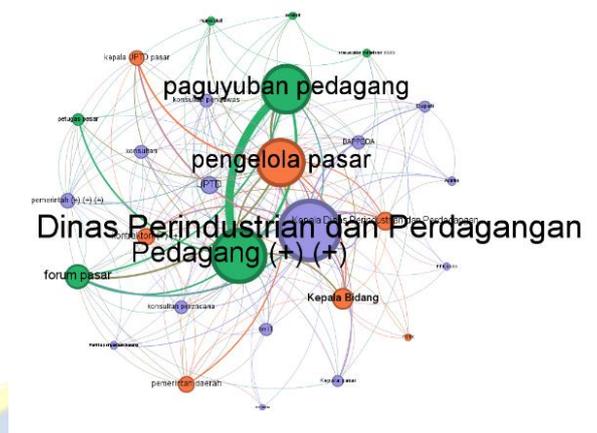
Indikator pertama, *big data integration*, terlihat telah mulai terpenuhi. Data yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pengelola pasar, mencakup berbagai variabel penting seperti jumlah pedagang, jenis dagangan, lokasi kios, kondisi sarana prasarana, serta nilai retribusi yang dibayarkan. Seluruh data ini dihimpun secara sistematis dalam bentuk dokumen Word dan Excel, serta dicatat secara berkelanjutan selama tahapan perencanaan hingga evaluasi. Keberadaan data yang terstruktur ini menjadi pondasi awal dalam membangun basis informasi yang mendalam terkait kondisi pasar dan pelaku kebijakan di dalamnya.

Namun, pada indikator *computational algorithms*, penerapan teknologi masih belum optimal. Meskipun telah tersedia sistem informasi seperti SIMPasar yang mampu menyimpan dan mengintegrasikan data, pemanfaatan teknologi komputasi canggih seperti algoritma analitik atau visualisasi otomatis berbasis sistem masih sangat terbatas. Teknologi yang digunakan saat ini masih berfokus pada pencatatan administratif dan belum mengarah pada analisis hubungan antaraktor yang kompleks secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun data tersedia, pengolahannya belum dilakukan untuk mendukung strategi kebijakan berbasis jaringan sosial yang mendalam.

Kesimpulannya, dimensi Big Data dan Teknologi Komputasi dalam jaringan revitalisasi pasar di Banyumas menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pengumpulan data sudah berjalan baik, tetapi pengolahan dan analisis berbasis teknologi masih terbatas. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan pengembangan sistem analisis jaringan yang lebih terotomatisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi teknologi digital berbasis cloud. Hal ini akan memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kebijakan revitalisasi pasar secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil analisis pada konsep *Social Network Analysis* (SNA) di atas, diperoleh gambaran struktur hubungan antar aktor yang terlibat dalam proses revitalisasi pasar. Dengan menggunakan pendekatan SNA, dapat diidentifikasi aktor-aktor kunci, tingkat keterhubungan, serta pola interaksi yang terbentuk dalam jaringan tersebut. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pedagang, Pengelola Pasar, dan Paguyuban Pedagang menempati posisi sentral dengan tingkat keterhubungan yang tinggi terhadap aktor lainnya.

Gambar 2. Visualisasi Actor Network Kebijakan Revitalisasi Pasar



Visualisasi hasil analisis jaringan menggunakan Gephi menunjukkan bahwa struktur jaringan revitalisasi pasar di Banyumas cenderung terpusat, dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai aktor paling sentral. Aktor lain yang juga memiliki tingkat keterhubungan tinggi adalah pedagang, pengelola pasar, dan paguyuban pedagang. Ketebalan garis penghubung antaraktor menggambarkan intensitas komunikasi dan kekuatan relasi, yang mencerminkan kolaborasi yang kuat di antara aktor-aktor inti. Sementara itu, aktor teknis dan struktural seperti konsultan dan Bappeda lebih berperan sebagai pendukung dalam tahap perencanaan dan pengawasan.

Dalam konteks teori SNA, posisi sentral aktor seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencerminkan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan aliran informasi dalam jaringan kebijakan revitalisasi pasar. Visualisasi jaringan menunjukkan intensitas interaksi yang kuat, terutama antara pengelola pasar, pedagang, dan paguyuban pedagang, yang menandakan adanya kolaborasi erat dan saling ketergantungan. Sementara aktor lain seperti Kepala UPTD, Pemerintah Daerah, dan konsultan lebih berperan sebagai pendukung teknis dan fasilitator kebijakan. Keberhasilan revitalisasi sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aktor-aktor utama tersebut, khususnya partisipasi aktif komunitas pedagang, yang menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang partisipatif, responsif, dan berkelanjutan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas menempati posisi sentral dalam jaringan kebijakan revitalisasi pasar dengan tingkat keterhubungan dan pengaruh komunikasi yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pujiastuti *et al.* (2022) yang menemukan bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang menjadi aktor dominan dalam program percepatan pendaftaran tanah karena perannya yang luas dalam mengoordinasikan berbagai kepentingan. Sama halnya, dalam konteks Banyumas, peran sentral Dinperindag tidak hanya mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menjembatani berbagai kelompok seperti kontraktor, pengelola pasar, dan pedagang.

Namun, berbeda dengan temuan Sudirman *et al.* (2022) yang menyoroti lemahnya pelembagaan aktor dalam jaringan PKSAI di Gowa, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar aktor di jaringan revitalisasi pasar telah memiliki peran dan struktur yang cukup jelas, meskipun masih ditemukan keterbatasan pada beberapa pelaksana teknis seperti Tim Teknis dan Kepala Pasar yang memiliki tingkat konektivitas rendah. Temuan ini memperkuat studi Nurhidayah *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa model pentahelix dapat berjalan baik jika komunikasi dan peran antaraktor difungsikan secara aktif dan inklusif.

Lebih jauh, dari aspek sosial, penelitian ini menemukan adanya fenomena *homophily* yang kuat di antara komunitas pedagang, di mana mereka lebih nyaman dan intens berinteraksi sesama kelompoknya. Pola ini serupa dengan temuan Primaresti *et al.* (2022) dalam studi rasisme di media sosial yang menunjukkan adanya pengelompokan berdasarkan kesamaan identitas dan kepentingan. Namun, dalam konteks kebijakan revitalisasi pasar, struktur homogen ini diperkuat dengan peran *broker* seperti pengelola pasar yang menjembatani komunitas dengan pihak pemerintah, membentuk jaringan yang lebih kohesif, berbeda dengan studi Capaverde *et al.* (2023) yang menemukan hubungan teknis dalam jaringan keselamatan kerja cenderung terfragmentasi.

Dari sisi pemanfaatan teknologi, berbeda dengan temuan Cresswell (2010) yang mengevaluasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem layanan kesehatan berbasis *Actor-Network Theory*, penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital seperti SIMPasar masih terbatas pada pendataan administratif. Artinya, meskipun infrastruktur digital telah ada, pemanfaatan teknologi komputasi untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis data belum optimal. Temuan ini menolak premis Bilodeau & Potvin (2018) yang menyatakan bahwa keterlibatan entitas non-manusia (teknologi) dalam jaringan kebijakan sudah memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas intervensi kebijakan.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini memperluas cakupan studi jaringan kebijakan publik, khususnya di sektor revitalisasi pasar, dengan mengintegrasikan analisis enam dimensi *Social Network Analysis* berbasis pendekatan Light dan Moody (2020). Tidak hanya memetakan relasi antaraktor, tetapi juga menunjukkan perbedaan dan kesamaan dengan temuan sebelumnya dalam hal struktur jaringan, peran strategis aktor, hubungan sosial, interaksi multilevel, hingga keterlibatan teknologi. Hal ini memperkuat urgensi pengembangan kebijakan berbasis kolaborasi lintas aktor dan berbasis data, yang adaptif terhadap dinamika lokal dan kompleksitas jaringan kebijakan di daerah.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya faktor pendukung yang cukup kuat dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar, yaitu solidnya hubungan sosial di antara pedagang melalui komunitas informal dan paguyuban. Keakraban antar pedagang menciptakan jaringan komunikasi horizontal yang efektif, yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, meskipun belum melalui saluran resmi. Keberadaan paguyuban juga mempermudah proses sosialisasi dan penyampaian aspirasi, serta menjadi saluran strategis bagi pemerintah dalam menjangkau komunitas pasar secara langsung. Kolaborasi yang erat antara pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa dimensi sosial yang kuat mampu memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan meski dengan keterbatasan struktural.

Di sisi lain, faktor penghambat yang menonjol adalah masih terbatasnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan secara sistematis. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi teknologi, sebagaimana dikemukakan oleh Hamid (2018), bahwa keberhasilan manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan birokrasi dalam mengelola perubahan dan meningkatkan kapasitas institusionalnya. Meskipun data pasar telah terdigitalisasi menggunakan Excel, Word, dan sebagian melalui aplikasi SIMPasar, namun teknologi tersebut belum digunakan untuk analisis lanjutan berbasis algoritma atau pemetaan jaringan secara real-time. Akibatnya, proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan menjadi lebih lambat dan kurang berbasis data. Selain itu, adanya birokrasi hierarkis yang panjang juga menghambat kecepatan respon terhadap kebutuhan teknis di lapangan, yang dalam beberapa kasus menimbulkan kesenjangan antara perumusan kebijakan dan realitas implementasi di pasar.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas melibatkan jaringan aktor yang kompleks dan saling berinteraksi lintas sektor, level, dan fungsi. Melalui pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) berdasarkan teori Ryan Light dan James Moody, dapat disimpulkan bahwa jaringan kebijakan ini memiliki struktur yang cukup padat dengan keterhubungan yang tinggi antaraktor. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai aktor sentral yang mengoordinasikan aliran informasi, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan.

Secara struktural, jaringan memperlihatkan hubungan yang intensif, baik dalam hal jumlah koneksi (*degree*), peran penghubung (*betweenness*), maupun akses cepat terhadap aktor lain (*closeness*). Secara dinamis, hubungan antaraktor berkembang seiring waktu, dari yang semula bersifat formal menjadi lebih adaptif dan partisipatif, dengan difusi informasi yang berjalan dua arah. Dimensi sosial mengungkap adanya kecenderungan homophily dan pembentukan kelompok internal yang erat, didukung oleh aktor penghubung seperti pengelola pasar dan pemerintah daerah.

Pada dimensi multilevel, jaringan terbentuk dari hubungan hierarkis antara pemerintah dan pelaksana teknis, serta interaksi horizontal antaraktor setingkat seperti sesama pedagang. Dimensi multimodal menampilkan keberagaman tipe aktor dan penggunaan berbagai saluran komunikasi, dari formal hingga digital, untuk memperkuat koordinasi kebijakan. Sementara itu, pada dimensi big data dan teknologi komputasi, meskipun data sudah terdigitalisasi, pemanfaatannya masih terbatas pada pencatatan administratif dan belum secara optimal mendukung pengambilan keputusan berbasis analitik jaringan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jaringan aktor dalam kebijakan revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas tergolong cukup efektif dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Namun, peningkatan pada aspek teknologi analitik, penguatan interaksi lintas kelompok, dan pemanfaatan sistem data yang lebih terintegrasi masih diperlukan untuk mendukung kebijakan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berbasis bukti.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki batasan pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu lokasi studi, yaitu Pasar Sumpiuh di Kabupaten Banyumas, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi analitik lanjutan yang hanya sampai pada visualisasi dan penghitungan indeks dasar jaringan. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses informan menyebabkan tidak semua aktor dapat diwawancarai secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian: Ke depan, penelitian dapat dikembangkan dengan memperluas lokasi studi ke beberapa pasar rakyat di wilayah lain, mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif, serta menerapkan algoritma komputasi lanjutan seperti *community detection* atau *predictive analytics* untuk mengidentifikasi pola interaksi dan potensi kolaborasi antaraktor secara lebih mendalam, sehingga mampu memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengambilan keputusan kebijakan publik yang adaptif dan berbasis data.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas atas dukungan, izin, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan, baik dari unsur dinas terkait, UPTD pasar, pengelola pasar, paguyuban pedagang, maupun para pedagang Pasar Sumpiuh, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi, pandangan, dan pengalaman berharga. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi kebijakan

revitalisasi pasar yang lebih partisipatif, efektif, dan berbasis kolaborasi di Kabupaten Banyumas maupun daerah lainnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriani, S. D. (2024). *Sekat Lapak Pedagang di Blok C Pasar Sumpiuh Dibongkar*. Radar Banyumas. <https://radarbanyumas.disway.id/read/123362/sekat-lapak-pedagang-diblok-c-pasar-sumpiuh-dibongkar>
- Bilodeau, A., & Potvin, L. (2018). Unpacking complexity in public health interventions with the Actor–Network Theory. *Health Promotion International*, 33(1), 173–181. <https://doi.org/10.1093/heapro/daw062>
- Capaverde, C., Bertelli Fogaça, L., & Henriqson, E. (2023). ACTOR-NETWORK THEORY FOR SAFETY SCIENCE: REASSEMBLING SOCIAL AND TECHNICAL ELEMENTS. *Revista de Administração de Empresas*, 63. <https://doi.org/10.1590/s0034-759020230302x>
- Cresswell, K. M., Worth, A., & Sheikh, A. (2010). Actor-Network Theory and its role in understanding the implementation of information technology developments in healthcare. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 10, 67. <https://doi.org/10.1186/1472-6947-10-67>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Proyek Prioritas Strategis. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, 313.
- Light, R., & Moody, J. (2020). *The Oxford Handbook of Social Networks*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=J-MJEAAAQBAJ>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Nurhidayah, S., Yuningsih, T., & Djumiarti, T. (2023). Jejaring Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi (Perbup No. 41 Tahun 2022). *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1–20.
- Park, A. Y. S., Krause, R. M., & Feiock, R. C. (2019). Does collaboration improve organizational efficiency? A stochastic frontier approach examining cities' use of EECBG funds. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 29(3), 414–428. <https://doi.org/10.1093/jopart/muy078>
- Primaresti, F., Rizky Murdiana, Yasmin, P. A., & Tiara Chaerani. (2022). Jaringan Aktor dan Konflik Peran dalam Isu Rasisme Papua. *Jurnal PolGov*, 4(2), 111–152. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i2.3641>
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Pujiastuti, I., Yuningsih, T., Herawati, A. R., Astuti, R. S., Priyadi, B. P., & Afrizal, T. (2022). Jaringan Aktor dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. *Perspektif*, 11(2), 667–673. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6076>
- Purba, G. P., Yuningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). Model Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen the Actor Network Model in the Development of Tourism in the Tourist Village of Wonolopo ,

- Mijen District , Semarang City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 183–209.
- Rahardian, R., & Zarkasi, I. F. (2021). Jejaring Aktor Dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan Dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun. *Jurnal Identitas*, 1(2), 26–38. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.143>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sudirman, R., Thahir, T., & Suryadi, S. (2022). Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamaseang di Kabupaten Gowa. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 207–222. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i2.8369>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zhong, S., Lee, C., & Lee, H. (2022). The role of community environments in older adults' intergenerational and peer social interactions. *Cities*, 128, 103785. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103785>

